



Jangan Anggap Remeh, Segera Isi Kekosongan Jabatan Kepala Sekolah

TAJUK

Ratusan kursi kepala sekolah di berbagai jenjang sekolah di DIY saat ini kosong. Di Kabupaten Bantul, sebanyak 153 jabatan kepala sekolah mulai jenjang TK, SD, hingga SMP, kosong. Kekosongan terjadi karena pejabat pensiun, masa tugas yang berakhir, maupun posisi yang memang belum terisi. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantul, masa tugas kepala sekolah berlaku selama empat tahun dan dapat diperpanjang. Namun, seiring berakhirnya masa jabatan dan adanya kepala sekolah yang pensiun, kebutuhan

pengisian jabatan terus bertambah. Selama 2025, kebutuhan kepala sekolah di Bantul mencapai 153 orang. Dari total kebutuhan tersebut, sekitar lima orang sudah siap ditempatkan, sementara 153 orang lainnya tengah disiapkan untuk menempati jabatan dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan. BKPSDM Bantul memproses penyiapan calon kepala sekolah melalui mekanisme terbaru sesuai regulasi. Untuk mengisi kekosongan jabatan, Disdikpora Bantul menunjuk pejabat kepala sekolah. Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Jogja. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora)

Kota Jogja mencatat ada kekosongan kepala sekolah di beberapa jenjang SD dan SMP. Kekosongan tersebut ditargetkan terisi pada akhir Desember 2025. Sama seperti di Bantul, kekosongan jabatan tersebut terjadi akibat kepala sekolah sebelumnya memasuki masa pensiun. Untuk jenjang SMA/SMK, Disdikpora DIY menyebut terdapat 21 sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah. Kekosongan ini akan segera diisi dengan kepala sekolah baru yang telah disiapkan. Dalam program layanan pendidikan, kekosongan jabatan kepala sekolah tak boleh dianggap remeh. Dalam struktur organisasi,

kepala sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Dalam pengembangan program pendidikan misalnya, kepala sekolah wajib memantau pelaksanaan kurikulum pembelajaran di sekolah yang dipimpin, prestasi dan perilaku para siswa. Kepala sekolah juga wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan, mengelola manajemen sekolah sekaligus melaksanakan kegiatan bersama jajarannya terkait dan masyarakat. Selain itu, kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam perencanaan pengembangan dan pembangunan sekolah

yang dipimpin. Melihat pentingnya peran, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, kekosongan ratusan kursi kepala sekolah di DIY harus segera diisi. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah (PKS) sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi kepala sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Program ini resmi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen)

No.7/2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Dengan dasar kebijakan yang kuat, program kepemimpinan sekolah dibangun agar berjalan sejalan dengan sistem yang ada sekaligus memberi ruang untuk peningkatan mutu pendidikan melalui kekuatan peran para pemimpin di satuan pendidikan. Melalui program PKS, pemerintah berharap bisa menghasilkan kepala sekolah yang tidak hanya memenuhi jumlah, tetapi juga memiliki kualitas kepemimpinan yang mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan di masing-masing wilayah.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005